

**RENCANA KERJA INSPEKTORAT
TAHUN 2024**



**KABUPATEN MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH	
TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan	
Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat	
Daerah	28
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	37
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	38
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	38
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	38
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	47
BAB V PENUTUP	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Inspektorat Kabupaten Malinau merupakan dokumen perencanaan pembangunan Inspektorat Kabupaten Malinau berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Inspektorat Kabupaten Malinau dan rencana pembangunan Inspektorat Kabupaten Malinau untuk 1 (satu) tahun yang akan datang, yang disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Inspektorat Kabupaten Malinau disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Inspektorat Kabupaten Malinau berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Malinau. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Inspektorat Kabupaten Malinau untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Malinau dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024. Renja Inspektorat Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan OPD, Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat hal-hal sebagai berikut :

1. Renja Inspektorat merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan sasaran strategis arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis

(Renstra) Inspektorat sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan Inspektorat untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
3. Renja Inspektorat merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Inspektorat pada tahun 2023 merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja Inspektorat dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Inspektorat mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain :

1. Program dalam Renja sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau pada tahun berkenan.
2. Program dan kegiatan dalam Renja Inspektorat selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Musrenbang.
3. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) serta dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

Dalam rangka menangani isu strategis “Belum meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan ekonomis” serta “Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah belum optimal” serta tujuan Inspektorat Kabupaten Malinau

yakni “Meningkatkan kualitas Pengawasan Keuangan dan Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan Evaluasi SAKIP OPD.”, maka Inspektorat Kabupaten Malinau menyusun Rencana Kerja Tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rancangan Awal RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2024. Renja Inspektorat yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Inspektorat.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Malinau adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.1137);
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau, dan Peraturan;

10. Peraturan Bupati Malinau Nomor 42 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Malinau.
11. Peraturan Bupati Malinau Nomor 64 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Intern Inspektorat Kabupaten Malinau;
12. Peraturan Bupati Malinau No.28.1 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026
13. Peraturan Bupati Malinau No.10 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 adalah sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan program, kegiatan dan sasaran yang ingin di capai pada tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau.

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yaitu :

- a. sebagai pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Malinau dalam merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran, dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2024;
- b. Mengoptimalkan tugas dan fungsi serta peranan Inspektorat Kabupaten Malinau selaku perangkat daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat tahun 2024 adalah :

- a. Untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PAS) Tahun 2024.
- b. Menjabarkan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Malinau ke dalam program dan kegiatan pengawasan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
- c. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Kabupaten Malinau dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Malinau.

- d. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja Inspektorat Kabupaten Malinau.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Malinau tahun 2024 adalah :

I.PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

II.HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III.TUJUAN DAN SASARAN, INSPEKTORAT

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat
- 3.3. Program dan Kegiatan

IV.RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

V.PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2023

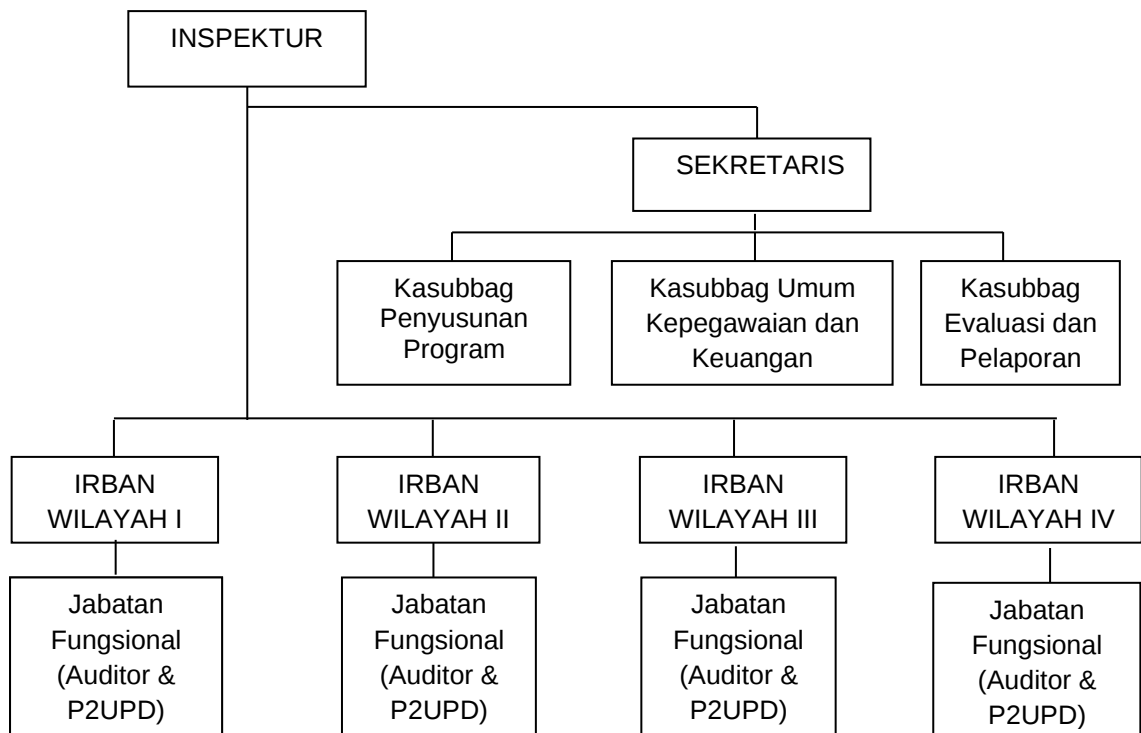
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2022 & CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT

Evaluasi realisasi capaian target diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan realisasi target kinerja dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dan sesuai dengan Renstra. Dengan kata lain capaian dilakukan untuk dapat mengetahui program/kegiatan mana yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, dan sebaliknya, juga dapat mengetahui program/kegiatan mana yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang tepat untuk mengatasinya.

2.1.1 Pengolahan Data dan Informasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Malinau Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, penyelenggaraan pemerintahan kecamatan serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Struktur Organisasi Inspektorat



Peraturan yang terkait tugas pokok dan fungsi Inspektorat

- a. Peraturan Bupati Malinau Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Malinau
- b. Peraturan Bupati Malinau Nomor 64 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Intern Inspektorat Kabupaten Malinau.

RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2024 yang terkait dengan Inspektorat

Inspektorat melaksanakan visi dan misi Bupati Malinau yakni :

Visi Bupati Malinau adalah **“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional”**

Misi Bupati Malinau adalah :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul
2. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi daerah, karakteristik dan kearifan lokal
3. Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
4. **Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan**

Inspektorat Kabupaten Malinau melaksanakan Misi ke-4 Bupati Malinau.
Sasaran Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2024 ke-2

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target
2	Terselenggaranya Pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN	Opini BPK	Poin	WTP
		Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	Nilai	25

Prioritas pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2024 yang ke-5 :

5 Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas :

- 1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 2) Program Informasi dan Komunikasi Publik
- 3) Program Aplikasi Informatika
- 4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 5) Program Kepegawaian Daerah
- 6) Program Penyelenggaraan Pengawasan**
- 7) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**

Program ke-4, ke-6, dan ke-7 dilaksanakan oleh Inspektorat.

Kebijakan Pemerintah Pusat terkait Inspektorat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2023. Kepala Daerah melakukan pengawasan terhadap perangkat daerah oleh Inspektorat dengan fokus :

1. Pemeriksaan kinerja
2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
3. Pengawasan mandatori
 - a. Kinerja rutin pengawasan

Reviu RPJMD, Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD Renja PD, KUA PPAS, RKA OPD), Reviu LKPD, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Reviu DAK, Evaluasi SPIP, Evaluasi SAKIP OPD, Monitoring Penyerapan Anggaran, Monitoring Pelaporan LHKPN dan LHKASN, Monitoring evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

b. Pengawasan Prioritas Nasional

Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum, Dana Desa, BOS

4. Pengawasan Reformasi Birokrasi
5. Penegakan Integritas
6. Penerapan Manajemen Risiko
7. Peningkatan APIP

2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat tahun 2022 dan Capaian Renstra Inspektorat

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Secara umum capaian kinerja program/kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Malinau pada tahun 2022 dapat disampaikan baik, hal ini dilihat dari realisasi kegiatan fisik tahun 2022 terdapat 12 (dua belas) kegiatan mencapai 100% yaitu :

- a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Target 3 Laporan terlaksana 3 Laporan sehingga terealisasi 100,00%.
- b. Reviu Laporan Kinerja Target 5 Laporan dan terlaksana 5 Kegiatan sehingga terealisasi 100,00%.
- c. Reviu Laporan Keuangan Target 3 Laporan dan terlaksana 3 Kegiatan sehingga terealisasi 100,00%.
- d. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Target 50 Laporan dan terlaksana 85 Laporan sehingga terealisasi 106,25%
- e. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Target 3 Kasus dan terlaksana 16 Kasus sehingga terealisasi 533,33%.
- f. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan target 1 Laporan dan terlaksana 1 Laporan sehingga terealisasi 100,00%.

- g. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah target 10 OPD terlaksana 10 OPD sehingga terealisasi 100,00%.
- h. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi target 10 OPD terlaksana 10 OPD sehingga terealisasi 100,00%.
- i. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi target 3 Perangkat Daerah dan terlaksana 3 Perangkat Daerah sehingga terealisasi 100,00%.
- j. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas target 3 Perangkat Daerah sehingga terealisasi 100,00%
- k. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya target 36 Stel dan terlaksana 36 Stel sehingga terealisasi 100,00%
- l. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi target 36 Orang dan terlaksana 51 Orang sehingga terealisasi 141,67%
- m. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor target 26 jenis terealisasi 100,00%
- n. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD target 21 kali terealisasi 100,00%
- o. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya target 14 Unit dan terlaksana 14 unit sehingga terealisasi 100,00%

2. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

- a. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target 32 OPD untuk tahun 2022 terealisasi 24 OPD atau 75,00%.
- b. Pengawasan Desa
Pengawasan desa dengan target 109 Desa untuk tahun 2022 terealisasi 98 Desa atau 89,91%.
- c. Kerjasama Pengawasan Internal
Kerjasama pengawasan internal dengan target 3 Laporan untuk tahun 2022 terealisasi 1 Laporan atau 33,33%.
- d. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah untuk tahun 2022 ditargetkan 3 kasus terealisasi 0 Kasus atau 0,00%

e. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan target 35 Fungsional Tertentu untuk tahun 2022 terealisasi 12 Fungsional tertentu atau 34,29%

f. Pengadaan Aset Tak Berwujud

Pengadaan Aset Tak Berwujud dengan target 2 Aplikasi untuk tahun 2022 terealisasi 1 Aplikasi atau 50,00%

3. Faktor-Faktor Penyebab tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Beberapa Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan yang telah selesai dilaksanakan sebagai berikut :

1. Komitmen yang kuat dari pimpinan pelaksana/ pegawai untuk mencapai target yang telah ditentukan;
2. Dukungan partisipasi serta sikap kooperatif OPD dan pihak terkait;

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/ kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia
2. Kegiatan pengawasan keuangan pemerintah daerah dan pengawasan desa pada tahun 2022 berjalan tidak sesuai PKPT dikarenakan keterbatasan waktu.
3. Kegiatan pengawasan internal merupakan joint audit dengan BPK, BPKP dan APH. Untuk tahun 2022 yang terlaksana adalah joint audit dengan BPK.
4. Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah merupakan kegiatan yang dilaksanakan atas dasar limpahan kasus dari APH, untuk tahun 2022 tidak ada limpahan kasus.
5. Kegiatan terkait dengan pihak eksternal sehingga harus menyesuaikan jadwal eksternal tersebut.
6. Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian adalah kegiatan yang menghitung angka kredit jabatan fungsional auditor per tahun,

untuk tahun 2022 jumlah auditor inspektorat adalah 12 orang, untuk tahun 2024 target akan disesuaikan dengan jumlah JFA.

4. Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Inspektorat

Berdasarkan target capaian program sesuai dengan Renstra Inspektorat Kabupaten Malinau 2021-2026, secara umum seluruh program/kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan tingkat capaian kinerja Rata-rata 90,74 %. Berdasarkan target capaian program pada Renstra tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022 secara umum mampu memenuhi target capaian program pada Renstra Inspektorat Kabupaten Malinau, ini menjadi awal yang baik untuk melangkah di tahun yang akan datang.

5. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Beberapa kebijakan/tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan capaian program/kegiatan :

- 1) Melaksanakan perencanaan yang optimal dengan memperhitungkan anggaran, waktu, dan SDM yang tersedia, serta jadwal pihak eksternal terkait;
- 2) Melaksanakan kegiatan secara efektif, efisien, dan ekonomis;
- 3) Meningkatkan kualitas APIP dengan mengikutkan diklat atau bimbingan teknis serta berkoordinasi dan melibatkan pihak-pihak terkait.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat dan pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 (T-C 29) dibawah ini.

Tabel 2.1 (T-C.29).
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah & Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Malinau

Nama OPD : Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Inspektorat 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program & Kegiatan (Renja Inspektorat 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Inspektorat s/d 2023	
					Target Renja Inspektorat 2022	Realisasi Renja Inspektorat 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN	Persentase pengawasan terhadap objek pemeriksaan	100%					100%	100%	100%
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase OPD dan Desa yang diawasi	100%					100%	100%	100%
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	15 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	6 Laporan	40%
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	160 Laporan		32 Laporan	32 laporan	100%	32 Laporan	70 Laporan	40%
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	25 laporan		5 Laporan	5 Laporan	100%	5 laporan	10 Laporan	40%
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	15 laporan		3 Laporan	3 Laporan	100%	3 laporan	6 Laporan	40%
	Pengawaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	545 Laporan		109 Laporan	98 Laporan	100%	98 desa	196 Laporan	35,96%
	Kerjasama	Jumlah Kesepakatan	15 Kesepakata		3 Laporan	3 laporan	100%	3 laporan	6 Laporan	40%

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Inspektorat 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program & Kegiatan (Renja Inspektorat 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Inspektorat s/d 2023	
					Target Renja Inspektorat 2022	Realisasi Renja Inspektorat 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal yang Terbentuk	n							
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	650 Laporan		50 Laporan	29 Laporan	100%	130 Laporan	159 Laporan	24,46%
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase kasus terlapor yang diperiksa	100%					100%	100%	100%
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	16,67%
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	15 Laporan		16 laporan	16 Laporan	100%	3 laporan	19 laporan	126,67%
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI	Persentase pendampingan yang dilaksanakan	100%					100%	100%	100%
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi	Persentase OPD yang dinilai	100%					100%	100%	100%

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Inspektorat 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program & Kegiatan (Renja Inspektorat 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Inspektorat s/d 2023	
					Target Renja Inspektorat 2022	Realisasi Renja Inspektorat 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengawasan									
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	5 Rekomenda si		1 Rekomendasi	1 Rekomend asi	100 %	1 Rekomenda si	2 Rekomendasi	40%
	Pendampingan dan Asistensi									
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	50 Perangkat Daerah		10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	100%	10 Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah	40,00%
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	50 Perangkat Daerah		10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	100%	10 Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah	40,00%
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	2 Kegiatan	40,00%

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Inspektorat 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program & Kegiatan (Renja Inspektorat 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Inspektorat s/d 2023	
					Target Renja Inspektorat 2022	Realisasi Renja Inspektorat 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	15 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	100%	3 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	40,00%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan penunjang	100%				100%	100%	100%
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan gaji	100%				100%	100%	100%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	186 Orang/Bulan	34 Orang/bulan	34 Orang/bula n	100%	44 Orang/Bulan	78 Orang/Bulan	41,93%
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan pelaksanaan tugas	100%				100%	100%	100%
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	178 Paket	34 Paket	34 Paket	100%	36 Paket	70 Paket	39,32%

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Inspektorat 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program & Kegiatan (Renja Inspektorat 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Inspektorat s/d 2023	
					Target Renja Inspektorat 2022	Realisasi Renja Inspektorat 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepengawaaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepengawaaian	75 Orang		12 Orang	12 Orang	100%	15 Orang	27 Orang	36,00%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	180 Orang		51 Orang	51 Orang	100%	36 orang	72 Orang	48,33%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan sarana dan prasarana	100%					100%	100%	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	130 Paket		26 Paket	26 Paket	100%	26 Paket	52 Paket	40,00%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	40,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105 Laporan		21 Laporan	21 laporan	100%	21 Laporan	42 Laporan	40,00%

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Inspektorat 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program & Kegiatan (Renja Inspektorat 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Inspektorat s/d 2023	
					Target Renja Inspektorat 2022	Realisasi Renja Inspektorat 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan barang	100%					100%	100%	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 unit		14 unit	14 unit	100%	10 unit	24 unit	48,00%
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	5 Unit		1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3 Unit	40,00%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan surat	100%					100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan pemeliharaan	100%					100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit		1 Unit	1 Unit	100%	1 unit	2 unit	40,00%

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Inspektorat 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program & Kegiatan (Renja Inspektorat 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Inspektorat s/d 2023	
					Target Renja Inspektorat 2022	Realisasi Renja Inspektorat 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	115 unit		23 unit	23 unit	100%	23 unit	46 unit	40,00%

Sumber: Sub Bagian Penyusunan Program Inspektorat

Penjelasan atas tabel 2.1 (T-C 29) capaian kinerja Inspektorat tahun 2022 per kegiatan adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN

1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Target 3 Laporan terealisasi 3 Laporan (100%) yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Bappeda dan Litbang 100%

2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah target 32 OPD dan terealisasi 32 organisasi perangkat daerah tahun 2022 Yaitu :

Dinas Perikanan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Bagian Tata Pemerintahan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Umum dan Perlengkapan, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Hukum, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat DPRD, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Linmas.

3. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022 dengan target 3 (tiga) yaitu Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022, Reviu RKA, Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK)

4. Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022 dengan target 5 (lima) yaitu Reviu LKjIP Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2022, Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2021, Evaluasi SAKIP OPD, Reviu Perubahan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau Tahun 2022, Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ per triwulan.

5. Pengawasan Desa

Target 109 Desa terealisasi 98 Desa atau 98,91% yaitu Kantor Camat Malinau Barat dan Desa Tanjung Lapang, Desa Long Kenipe, Desa Sentaban, dan Desa Long Bila di Kecamatan Malinau Barat, Desa Sempayang, Desa Sesua, dan Desa

Punan Bengalun di Kecamatan Malinau Barat, Desa Kuala Lapang dan Desa Taras di Kecamatan Malinau Barat, Kantor Camat Malinau Utara dan Desa Malinau Seberang, Desa Respen Tubu, Desa Luso, dan Desa Sembuak Warod di Kecamatan Malinau Utara, Desa Kaliamok, Desa Lubak Manis, Desa Semengaris, dan Desa Kelapis di Kecamatan Malinau Utara, Desa Belayan, Desa Putat, Desa Salap, dan Desa Seruyung di Kecamatan Malinau Utara, Kantor Camat Malinau Kota dan Desa Malinau Kota, Desa Pelita Kanaan, Desa Malinau Hulu, Kantor Camat Malinau Selatan Hilir dan Desa Setarap, Desa Batu Kajang, Setulang, Desa Punan Gong Solok, Desa Long Adiu, dan Desa Punan Long Adiu Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kantor Camat Malinau Selatan Hulu dan Desa Tanjung Nanga, Desa Metut, Desa Nahakramo, Desa Long Lake, dan Desa Long Jalan di Kecamatan Malinau Selatan Hulu, Desa Long Simau, Desa Long Mekatif, Desa Long Kebinu, dan Desa Long Pala di Kecamatan Mentarang Hulu, Kantor Camat Malinau Selatan dan Desa Long Loreh, Desa Paya Seturan, Desa Nunuk Tana Kibang, Desa Punan Rian, Desa Langap, dan Desa Bila Bekayuk di Kecamatan Malinau Selatan, Desa Punan Mirau, Desa Long Rat, Desa Halanga, dan Desa Laban Nyarit di Kecamatan Malinau Selatan, Kantor Camat Sungai Boh dan Desa Mahak Baru, Desa Dumu Mahak, Desa Data Baru, Desa Agung Baru, Desa Long Lebusan, dan Desa Long Top, Kantor Camat Kayan Selatan dan Desa Long Ampung, Desa Metulang, Desa Sungai Barang, Desa Lidung Payau, dan Desa Long Uro, Kantor Camat Kayan Hulu dan Desa Long Nawang, Desa Nawang Baru, Desa Long Temuyat, Desa Long Betaoh, Desa Long Payau, Kantor Camat Kayan Hilir dan Desa Data Dian, Desa Sei Anai, Desa Long Metun, Kantor Camat Sungai Tubu dan Desa Long Pada, Desa Long Ranau, Desa Long Nyau, Desa Rian Tubu dan Desa Long Titi di Kecamatan Sungai Tubu, Kantor Camat Perwakilan Kayan Hilir dan Desa Long Sule, Desa Long Pipa, Desa Temalang, Long Liku, Long Gafid di Kecamatan Mentarang, Kantor Camat Mentarang Hulu dan Desa Long Berang, Desa Long Semamu, Desa Long Sulit, Kantor Camat Bahau Hulu dan Desa Long Alango, Desa Long Uli, Desa Long Tebulo, Desa Long Kemuat, Desa Long Berini, Desa Apau Ping, Kantor Camat Pujungan dan Desa Long Pujungan, Desa Long Paliran, Desa Long Bena, Desa Long Belaka Pitau, Desa Long Aran, Desa Long Lame, Desa Long Pua, Desa Long Ketaman, Desa Long Jelet,

6. Kerjasama Pengawasan Internal

Target 3 laporan terealisasi 1 laporan (33,33%) yaitu Inspektorat melakukan pendampingan pemeriksaan kepada BPK sebanyak 1 kali

7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Target 50 Laporan terealisasi 29 Laporan atau 58% yaitu monitoring dan evaluasi Tindak lanjut Temuan BPK pada Dinas Kesehatan PP&KB, Dinas Pekerjaan Umum Perkim, Sekretariat DPRD, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Badan Pengelolaan Keuangan, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Dinas Perikanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Tata Pemerintahan. monitoring dan evaluasi Tindak lanjut Temuan Inspektorat pada Kantor Kepala Desa Malinau Hulu, Kantor Kepala Desa Punan Bengalun, Kantor Kepala Desa Sesua, Kantor Kepala Desa Sempayang, Kantor Kepala Desa Malinau Seberang, Kantor Kepala Desa Tanjung Lapang, Kantor Kepala Desa Kuala Lapang, Kantor Kepala Desa Taras, Dinas Kesehatan PP&KB, Dinas Perikanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kantor Kepala Desa Pelita Kanaan, Kantor Kepala Desa Malinau Kota

8. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah ditargetkan 3 kasus terealisasi 0 Kasus atau 0,00%

9. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan target 3 (tiga) PDTT dan terealisasi 16 (Enam belas) laporan hasil pemeriksaan hibah dan bantuan sosial & PDTT atau 100% yaitu :

Desa Malinau Hulu, Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota dan Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara TA 2021, Probit Audit pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terhadap Kegiatan Dana Desa yang telah di sampel pada Pemeriksaan Pendahuluan di Desa Metut, Nahakramo, Long Jalan pada Kecamatan Malinau Selatan Hulu Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021, Pengawasan Vaksin, PDTT atas dugaan perilaku tidak menyenangkan Aparat Desa terhadap Mahasiswa KKN UBT di Desa Sesua, PDTT atas dugaan perilaku tidak menyenangkan Aparat Desa terhadap Mahasiswa KKN UBT di Desa Sesua, PDTT atas dugaan penyalagunaan Dana Desa (APBDes) Desa Batu Lidung Kec.

Malinau Kota, Melaksanakan Pengawasan Vaksin pada Dinas KPP&KB, PDTT atas Kegiatan Peningkatan/Pengerasaan Jalan Penghubung Desa Pelancau Hulu TA 2021, PDTT atas Kegiatan Pembangunan PLTMH TA 2019, 2020 dan 2021 (DDS) di Desa Long Paliran Kec. Pujungan, Probity Audit pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman, Melaksanakan Pengawasan Vaksin pada Dinas KPP&KB.

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI

1. Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
Target 1 laporan saber pungli terealisasi 1 laporan saber pungli (100%).
2. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
Target 10 Perangkat Daerah terealisasi Perangkat Daerah (100%) yaitu Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Inspektorat, Dinas Ketahanan Pangan, Bagian Perekonomian, Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
Target 10 Perangkat Daerah terealisasi 10 Perangkat Daerah (100%). Yaitu Badan Perencanaan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Dinas Pertanian, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas Pendidikan, Inspektorat.
4. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi target 1 laporan terealisasi 1 laporan (100%)
5. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas yaitu Nilai MCP per 31 Desember 2022 81,36 %, Survei Penilaian integritas sudah dilaksanakan oleh KPK, Zona integritas tidak dilaksanakan karena dalam proses persiapan dan pengusulan ke Kementrian PAN-RB dengan target 3 (tiga) Perangkat daerah dan terealisasi 3 (tiga) Perangkat Daerah atau 100,00%

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 36 (tiga puluh enam) orang ASN dan terealisasi 36 (tiga puluh enam) orang ASN yang menerima gaji dan tunjangan atau 100%
2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan target 36 Stel terlaksanakan 36 Stel atau 100%
3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan target 35 (tiga puluh lima) fungsional tertentu dan terealisasi 12 (dua belas) Pejabat Fungsional Auditor/P2UPD yang dapat dinilai atau 34,29%
4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan target 36 (tiga puluh enam) APIP dan terealisasi 51 (Lima puluh satu) APIP atau 141,67%
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target 26 (dua puluh enam) jenis ATK dan yang terealisasi 26 (dua puluh enam) perlengkapan kantor yang tersedia atau 100%
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 21 Laporan dan terealisasi 21 laporan atau 100,00%
7. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan target 14 (empat belas) unit dan yang terealisasi 14 (empat belas) unit atau 100%
8. Pengadaan Aset Tak Berwujud dengan target 2 Aplikasi terlaksana 1 Aplikasi atau 50,00%

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT

Untuk mengukur bagaimana kinerja maka diperlukan ukuran yang dapat menggambarkan keberhasilan dari kinerja itu sendiri atau dinamakan dengan indikator. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai urusan tersebut telah dipilih indikator untuk mengukur keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Malinau yang terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Analisis Kinerja Inspektorat Tahun 2022 sebagai bahan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 (T-C.30).
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Malinau

Kode	Indikator Kinerja Utama	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Inspektorat				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)
1	Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	-		70%	80%	85%	90%	86,11%	86,36%	90%		

Kode	Indikator Kinerja Utama	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Inspektorat				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
2	Level Kapabilitas APIP	-		2,5	3	3,1	3,2	2,0	2,0	3		
3	Persentase kepuasan Penerima layanan <i>consulting</i>			75%	80%	85%	90%	74,11%	76,53%	80%		
4	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP $\geq$ 67	-		60%	70%	80%	90%	43,11%	48,83%	100%		

Sumber : Sub Bagian Penyusunan Program Inspektorat 2022

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAN TUGAS & FUNGSI INSPEKTORAT

Pada RKPD Kabupaten Malinau tahun 2024 terdapat isu strategis Kabupaten Malinau pada tahun 2024 yang terkait tugas pokok dan fungsi Inspektorat (Isu strategis ke-5) yaitu **Tuntutan Publik Terhadap Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**. Terkait isu strategis Kabupaten Malinau tersebut maka Inspektorat juga menghadapi 7 isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kinerja pada tahun 2024 yaitu :

1. Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi
2. Meningkatkan penilaian kinerja OPD secara komprehensif
3. Meningkatkan kualitas rewiu RKA OPD, rewiu LKPD, LKjIP, rewiu DAK dan penyerapan anggaran.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku
5. Meningkatkan pengawasan sesuai dengan permintaan pihak terkait
6. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) APIP
7. Meningkatkan sarana prasarana untuk menunjang pengawasan
8. Meningkatkan layanan *consulting*

2.4 REVIEW TERHADAP RKPD

Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2024 disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Malinau tahun 2024 serta membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian RPJP Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025 dengan berdasarkan pertimbangan atas kinerja pencapaian target Renstra, dan target kinerja yang dicapai oleh Inspektorat.

RKPD Kabupaten Malinau dapat dilihat pada tabel 2.3 (T-C.31) terlampir.

Tabel 2.3 (T-C.31).
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2023
Kabupaten Malinau

OPD : Inspektorat Kabupaten Malinau

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan			100%		Program Penyelenggaraan Pengawasan			100%		
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Persentase OPD dan Desa yang diawasi	100%		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Persentase OPD dan Desa yang diawasi	100%		
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Malinau	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Laporan	90,000,000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Malinau	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Laporan	150,000,000	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Malinau	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	32 Laporan	400,000,000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Malinau	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	32 Laporan	1,000,000,000	
	Reviu Laporan Kinerja	Kabupaten Malinau	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5 laporan	410,000,000	Reviu Laporan Kinerja	Kabupaten Malinau	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5 laporan	400,000,000	
	Reviu Laporan Keuangan	Kabupaten Malinau	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 laporan	150,000,000	Reviu Laporan Keuangan	Kabupaten Malinau	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 laporan	200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengawasan Desa	Kabupaten Malinau	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	98 Laporan	1,100,000,000	Pengawasan Desa	Kabupaten Malinau	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	98 Laporan	2.100.000.000	
	Kerjasama Pengawasan Internal	Kabupaten Malinau	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepakatan	25,000,000	Kerjasama Pengawasan Internal	Kabupaten Malinau	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepakatan	100.000.000	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kabupaten Malinau	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	130 Laporan	160,000,000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kabupaten Malinau	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	130 Laporan	900.000.000	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Persentase Kasus Terlapor Yang Diperiksa	100%		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Persentase Kasus Terlapor Yang Diperiksa	100%		
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kabupaten Malinau	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	70.000.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kabupaten Malinau	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	400.000.000	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Malinau	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	3 laporan	100.000.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Malinau	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	3 laporan	400.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi		Persentase pendampingan yang dilaksanakan	100%		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi		Persentase pendampingan yang dilaksanakan	100%		
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan										
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kabupaten Malinau	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	200.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kabupaten Malinau	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	400.000.000	
	Pendampingan dan Asistensi		Persentase OPD yang dinilai	100%		Pendampingan dan Asistensi		Persentase OPD yang dinilai	100%		
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Malinau	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	10 Perangkat Daerah	120.000.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Malinau	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	10 Perangkat Daerah	500.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten Malinau	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 Perangkat Daerah	50.000.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten Malinau	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 Perangkat Daerah	400.000.000	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kabupaten Malinau	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	35.000.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kabupaten Malinau	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	250.000.000	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kabupaten Malinau	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6 Perangkat Daerah	370.000.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kabupaten Malinau	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6 Perangkat Daerah	500.000.000	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Unit Kerja Yang Mendapat Pelayanan Penunjang	100%		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Unit Kerja Yang Mendapat Pelayanan Penunjang	100%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan gaji	100%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan gaji	100%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Malinau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 orang/Bulan	8.214.850.774	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Malinau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 orang/Bulan	9.214.850.774	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan pelaksanaan tugas	100%		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan pelaksanaan tugas	100%		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Malinau	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	36 Paket	20.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Malinau	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	36 Paket	100.000.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Malinau	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15 D Orang	25.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Malinau	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15 D Orang	100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Malinau	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36 orang	250.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Malinau	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36 orang	2.200.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan sarana dan prasarana	100%		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan sarana dan prasarana	100%		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Malinau	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26 Paket	100.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Malinau	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26 Paket	200.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Malinau	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Malinau	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Malinau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 Laporan	500.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Malinau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 Laporan	500.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan barang	100%		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan barang	100%		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Malinau	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	90.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Malinau	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	900.000.000	
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kabupaten Malinau	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	50.000.000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kabupaten Malinau	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	200.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan surat	100%		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan surat	100%		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Malinau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Malinau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan pemeliharaan	100%		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan pemeliharaan	100%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Malinau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	40.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Malinau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	40.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Malinau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 unit	10.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Malinau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 unit	50.000.000	
TOTAL					12.714.850.774	TOTAL					21.259.850.774

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Malinau pada tahun 2024 merupakan kegiatan inisiatif Inspektorat. Hal ini karena pada Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Malinau untuk kegiatan tahun 2024 tidak terdapat usulan kegiatan pada Inspektorat serta musrenbang masyarakat juga tidak ada yang mengusulkan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Malinau.

Tabel 2.4 (T-C.31).
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Malinau

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	catatan
1	2	3	4	5	6

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan Tugas Pokok, dan Fungsi Inspektorat adalah Permendagri 23 Tahun 2020 Tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021, oleh karena itu Kegiatan yang direncanakan oleh Inspektorat untuk Tahun 2024 merupakan kegiatan yang diamanatkan oleh peraturan tersebut.

Rencana Kinerja Inspektorat Kabupaten Malinau tahun 2024 juga selaras dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional yang juga merupakan Prioritas Nasional dalam rancangan RKP tahun 2024 ke-7 yaitu **“Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik”**.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU

Selaras dengan Sasaran Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2024 seperti yang tertuang pada RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2024 yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Terselenggaranya Pemerintahan Bebas KKN” dengan indikator sasaran yaitu:

- a. Nilai SAKIP;
- b. Nilai LPPD;
- c. Opini BPK.

Maka Inspektorat Kabupaten menetapkan tujuan dan sasaran :

1. Tujuan Strategis Inspektorat
 - 1) Meningkatkan kualitas pengawasan keuangan.
 - 2) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi SAKIP OPD
2. Sasaran
 - 1) Meningkatnya pengawasan keuangan;
 - 2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN SASARAN TAHUN KE				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kualitas Pengawasan Keuangan		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya Pengawasan Keuangan	Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	70%	75%	80%	85%	90%
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi SAKIP OPD		Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	25	25	25	25	25
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Nilai SAKIP OPD (diatas 67)	60%	70%	80%	90%	100%

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Inspektorat Kabupaten Malinau melaksanakan 3 program, 10 kegiatan dan 26 sub kegiatan pada tahun 2024 selaras dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2024 yang ke-5 yakni “ Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas ”.

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 7. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 8. Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 11. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 3. Reviu Laporan Kinerja
 4. Reviu Laporan Keuangan
 5. Pengawasan Desa
 6. Kerjasama Pengawasan Internal
 7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 8. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 9. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

C. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

b. Pendampingan dan Asistensi

1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas Kabupaten Malinau untuk Tahun 2024 sebagaimana terlihat dalam tabel 3.2 (T.C 33) terlampir :

Tabel 3.2 (T-C.33).

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Inspektorat Kabupaten Malinau

Kode				Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1				Program Penyelenggaraan Pengawasan			100%				100%	
1	1			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase OPD dan Desa yang diawasi		100%				100%	
1	1	1		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Malinau	3 Laporan	90,000,000	DAU	Audit kinerja	3 Laporan	90.000.000
1	1	2		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Malinau	32 Laporan	400,000,000	DAU	Audit operasional	32 Laporan	400.000.000
1	1	3		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kabupaten Malinau	5 laporan	410,000,000	DAU	Reviu LKJIP, Reviu LPPD, Evaluasi SAKIP OPD, Reviu Penyerapan Anggaran	5 laporan	410.000.000
1	1	4		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kabupaten Malinau	3 laporan	150,000,000	DAU	Reviu LKPD, Reviu DAK, Reviu RKA	3 laporan	150.000.000
1	1	5		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kabupaten Malinau	98 Laporan	1,100,000,000	DAU	Audit desa	98 Laporan	1.100.000.000
1	1	6		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kabupaten Malinau	3 Kesepakatan	25,000,000	DAU	Pendampingan pemeriksaan	3 Kesepakatan	25.000.000
1	1	7		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil	Kabupaten Malinau	130 Laporan	160,000,000	DAU	Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	130 Laporan	160.000.000

Kode				Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Pemeriksaan APIP							
1	2			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Kasus Terlapor Yang Diperiksa		100%				100%	
1	2	1		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Kabupaten Malinau	2 Laporan	70.000.000	DAU	Audit tertentu terkait kerugian negara	2 Laporan	70.000.000
1	2	2		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Malinau	3 laporan	100.000.000	DAU	Audit tertentu selain kerugian negara	3 laporan	100.000.000
2				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Persentase pendampingan yang dilaksanakan		100%				100%	
2	1			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan								
2	1	1		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Kabupaten Malinau	1 Rekomendasi	200.000.000	DAU	Saber Pungli	1 Rekomendasi	100.000.000
2	1			Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang dinilai		100%				100%	
2	1	1		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Malinau	10 Perangkat Daerah	120.000.000	DAU	Penilaian Maturitas SPIP	10 Perangkat Daerah	120.000.000

Kode				Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	1	2		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten Malinau	10 Perangkat Daerah	50.000.000	DAU	PMPRB	10 Perangkat Daerah	50.000.000
2	1	3		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kabupaten Malinau	2 Kegiatan	35.000.000	DAU	<i>whistle blowing system</i>	2 Kegiatan	35.000.000
2	1	4		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kabupaten Malinau	6 Perangkat Daerah	370.000.000	DAU	MCP, Survei penilaian integritas, Zona pencegah integritas	6 Perangkat Daerah	370.000.000
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Unit Kerja Yang Mendapat Pelayanan Penunjang		100%				100%	
3				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan gaji		100%				100%	
3	1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Malinau	34 orang/Bulan	8.214.850.774	DAU		34 orang/Bulan	8.214.850.774
3	1	1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan pelaksanaan tugas		100%				100%	
3	2			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Malinau	36 Paket	20.000.000	DAU		36 Paket	20.000.000
3	2	1		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Kabupaten Malinau	15 Orang	25.000.000	DAU	Penilaian angka kredit auditor	15 Orang	25.000.000

Kode					Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Kepegawaian							
3	2	2			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Malinau	36 orang	250.000.000	DAU		36 orang	250.000.000
3	2	3			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan sarana dan prasarana		100%				100%	
3	3				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Malinau	26 Paket	100.000.000	DAU	ATK	26 Paket	100.000.000
3	3	1			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Malinau	1 Paket	30.000.000	DAU		1 Paket	30.000.000
3	3	2			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Malinau	21 Laporan	500.000.000	DAU		21 Laporan	500.000.000
3	3	3			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan barang		100%				100%	
3	4				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Malinau	10 unit	90.000.000	DAU	Pengadaan aset	10 unit	90.000.000
3	4	1			Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kabupaten Malinau	1 Unit	50.000.000	DAU		1 Unit	50.000.000
3	5	1			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan pemeliharaan		100%				100%	
3	6				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	Kabupaten Malinau	1 unit	40.000.000	DAU		1 unit	40.000.000

Kode				Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Jabatan	Pajaknya							
3	6	1		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Malinau	23 unit	10.000.000	DAU		23 unit	10.000.000
								12,714,850,774				12.714.850.774

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT TAHUN 2024

Untuk mendukung program kerja yang menjadi skala prioritas dan penunjang tersebut diatas, mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Malinau tahun 2024 maka diperlukan dana belanja yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2024 sebesar **Rp. 12.714.850.774**.

Inspektorat Kabupaten Malinau menetapkan 3 (tiga) program yang menjadi dasar tujuan yang diwujudkan dalam 24 (dua puluh empat) sub kegiatan, sebagai berikut :

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
I	Program Penyelenggaraan Pengawasan			100%			
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase OPD dan Desa yang diawasi		100%			
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Malinau	3 Laporan	90,000,000	DAU	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Malinau	32 Laporan	400,000,000	DAU	
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kabupaten Malinau	5 laporan	410,000,000	DAU	
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kabupaten Malinau	3 laporan	150,000,000	DAU	
	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kabupaten Malinau	98 Laporan	1,100,000,000	DAU	
	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kabupaten Malinau	3 Kesepakatan	25,000,000	DAU	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut	Kabupaten Malinau	130 Laporan	160,000,000	DAU	

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
		Hasil Pemeriksaan APIP					
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Kasus Terlapor Yang Diperiksa		100%			
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Kabupaten Malinau	2 Laporan	70.000.000	DAU	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Malinau	3 laporan	100.000.000	DAU	
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Persentase pendampingan yang dilaksanakan		100%			
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan						
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Kabupaten Malinau	1 Rekomendasi	200.000.000	DAU	
	Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang dinilai		100%			
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Malinau	10 Perangkat Daerah	120.000.000	DAU	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten Malinau	10 Perangkat Daerah	50.000.000	DAU	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan	Kabupaten Malinau	2 Kegiatan	35.000.000	DAU	

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
		Pemberantasan Korupsi					
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kabupaten Malinau	6 Perangkat Daerah	370.000.000	DAU	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Unit Kerja Yang Mendapat Pelayanan Penunjang		100%			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan gaji		100%			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Malinau	34 orang/Bulan	8.214.850.774	DAU	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan pelaksanaan tugas		100%			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Malinau	36 Paket	20.000.000	DAU	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Malinau	15 Orang	25.000.000	DAU	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Malinau	36 orang	250.000.000	DAU	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan sarana dan prasarana		100%			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Malinau	26 Paket	100.000.000	DAU	

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Malinau	1 Paket	30.000.000	DAU	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Malinau	21 Laporan	500.000.000	DAU	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan barang		100%			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Malinau	10 unit	90.000.000	DAU	
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kabupaten Malinau	1 Unit	50.000.000	DAU	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan pemeliharaan		100%			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Malinau	1 unit	40.000.000	DAU	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Malinau	23 unit	10.000.000	DAU	
Total					12.714.850.774		

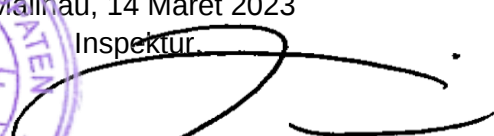
BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2024 memuat pelaksanaan 3 (tiga) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan dengan nilai Rp12.714.850.774,00 yang menjadi skala prioritas pembangunan tahun 2024. Renja Inspektorat 2024 disusun dengan memperhatikan :

- a. Tugas pokok dan fungsi Inspektorat sesuai Peraturan Bupati Malinau Nomor 42 Tahun 2016 yakni membantu Bupati dalam tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, penyelenggaraan pemerintahan kecamatan serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- b. Kegiatan *Mandatori* pengawasan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020.
- c. Peran Inspektorat seperti yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yakni *Assurance, Early Warning System, Improving Good Government, Consulting*.
- d. RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2023 terutama selaras dengan Prioritas Pembangunan Malinau tahun 2024 ke-6 yakni “Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik” yang dilaksanakan oleh Inspektorat melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan, Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi, serta Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024 yang telah disusun diharapkan dapat diimplementasikan serta dipergunakan dalam rangka mencapai tujuan Inspektorat Kabupaten Malinau yakni Meningkatkan Pengawasan Pengelolaan Keuangan terhadap OPD dan Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan OPD serta Sasaran Strategis Inspektorat yakni Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah dan Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Malinau, 14 Maret 2023
Inspektur.

DHANK SUBROTO, S.Hut.,M.Si
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19721212 200212 1 007

